

PENGUATAN IDENTITAS DAN SEGREGASI SOSIAL KOMUNITAS EKS PENGUNGGSI TIMOR TIMUR

Moh Soehadha

UIN Sunan Kalijaga

Alamat Email: suhadhaa@yahoo.co.id; soehadha16@gmail.com

Abstract

The exodus of East Timorese refugees after the 1999 referendum to Indonesia left a problem till now. International refugee affairs agencies, the Indonesian government, and non-governmental organizations have helped repatriate refugees. But many refugees do not want to return and choose to stay in Indonesia. Many of them choose to stay in the border area in Belu Regency, East Nusa Tenggara. This study aims to describe the lives of former East Timorese refugees in Belu and their interactions with the natives. The results showed that there is social segregation in the interaction between ex-refugees from East Timor and the natives. Resettlement policies for refugees that are top down and tend to pay less attention to the needs of refugees cause social problems, land access, economy, education, economic and political commodification, and social conflict. The separation of East Timorese refugee settlements from natives led to the strengthening of group identity and social segregation, which led to exclusivity in social process.

Keywords: Identity, Segregation, East Timor refugees

Intisari

Eksodus pengungsi Timor Timur pasca jajak pendapat di tahun 1999 ke Indonesia menyisakan masalah hingga kini. Lembaga urusan pengungsi internasional, pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat telah membantu melakukan pemulangan kembali (repatriasi) terhadap para pengungsi. Namun banyak pengungsi tidak mau kembali dan memilih tetap tinggal di Indonesia, di antaranya mereka memilih tetap tinggal di daerah perbatasan di Belu, Nusa Tenggara Timur. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan eks

pengungsi Timor Timur di Belu dan interaksinya dengan penduduk lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya segregasi sosial dalam interaksi antara warga eks pengungsi Timor Timur dengan warga lokal. Kebijakan pemukiman kembali (*resettlement*) untuk pengungsi yang bersifat *top down* dan cenderung kurang memperhatikan kebutuhan pengungsi menyebabkan munculnya permasalahan sosial, yaitu akses tanah, ekonomi, pendidikan, komodifikasi ekonomi dan politik, serta konflik sosial. Pemisahan pemukiman eks pengungsi Timor Timur dari penduduk lokal menyebabkan menguatnya identitas dan segregasi sosial kelompok yang mengarah kepada eksklusifitas dalam proses sosial.

Kata kunci: Identitas, Segregasi, Pengungsi Timor Timur

Pendahuluan

Gejolak Politik di Timor Timur pasca jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 yang mengakibatkan lepasnya Provinsi Timor-Timur dari Indonesia, telah menyebabkan eksodus atau pengungsian warga Timor Timur dalam jumlah besar dari wilayah Timor-Timur ke beberapa propinsi di Indonesia. Dalam jajak pendapat di bawah pengawasan United Nations Mission in East Timor (UNAMET), tercatat dari suara total yang memilih sejumlah 438.998 suara, sebanyak 344.580 atau 78,5 % menginginkan Timor Timur merdeka dan menolak integrasi dengan otonomi khusus. Adapun sejumlah 94.388 jiwa atau 21,5 persen peserta jajak pendapat memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Di antara mereka yang eksodus, terdapat 250.000 warga Timor-timur yang mengungsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan terdekat dan berhadapan langsung dengan Timor Timur, merupakan tempat yang banyak menampung para pengungsi Timor Timur. Data dari Sekertariat Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi NTT (2005) menunjukkan terdapat 104.436 pengungsi di NTT, dan sebagian besar pengungsi atau sejumlah 70.453 orang tinggal di Kabupaten Belu. Mereka menyebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Belu.¹

Dari hasil pengamatan di salah satu pemukiman eks pengungsi Timor Timur di Sukabitetek, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, mereka tinggal dan mengolah lahan milik warga setempat dan lahan

1 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160817091559-20-151908/kisah-warga-eks-timor-timur-memilih-indonesia-lalu-diabaikan>

milik pemerintah. Di antara program yang diberikan untuk pengungsi Timor Timur oleh pemerintah, lembaga internasional yang mengurus masalah pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization for Migration (IOM), dan juga lembaga swadaya masyarakat di Indonesia adalah repatriasi atau pemulangan kembali. Terdapat empat program untuk eks pengungsi Timor Timur yang dilaksanakan, yaitu transmigrasi, pemukiman kembali, repatriasi, dan kompensasi berupa materi. Repatriasi dianggap sebagai cara terbaik untuk membantu pengungsi kembali hidup secara wajar di tanah kelahirannya, namun demikian tidak semua pengungsi memilih repatriasi. Bahkan repatriasi bagi pengungsi Timor Timur dianggap sebagai pilihan yang penuh resiko, dan tidak menjamin pengungsi dapat hidup lebih baik di tanah asalnya.

Pilihan untuk tidak mengikuti repatriasi menyebabkan pengungsi Timor Timur harus mendapat rumah tinggal permanen, bukan hanya sekedar tinggal di pemukiman sementara. Hanya sebagian kecil dari pengungsi yang kemudian mampu membeli atau menyewa lahan sendiri untuk membangun tempat tinggal. Sementara itu sebagian besar dari mereka diberi jalan keluar oleh pemerintah untuk hidup di Indonesia dengan mengikuti program transmigrasi, dan sebagian lagi diberikan bantuan untuk menempati pemukiman di atas lahan pemerintah melalui program pemukiman kembali (*resettlement*). Eks Pengungsi Timor Timur yang telah mendapat rumah tinggal melalui program pemukiman kembali, kemudian disebut sebagai "warga baru".

Istilah warga baru juga dapat dikaitkan dengan implikasi dari Surat Dirjen Bantuan Sosial tanggal 23 November 2009 yang menyatakan bahwa penanganan eks pengungsi sudah selesai, sehingga tidak ada bantuan lagi untuk mereka. Implikasinya eks pengungsi Timor Timur tidak lagi dikatakan sebagai pengungsi yang masih membutuhkan bantuan, namun sebagai "warga baru". Dalam konteks yang lain, misalnya dalam kasus di kamp pengungsi Haliwen dan Fatubenau, sebutan warga baru dikenakan untuk warga eks pengungsi Timor Timur akibat peristiwa jajak pendapat tahun 1999². Sementara itu sebutan warga lama diberikan kepada warga pengungsi Timor Timur yang lebih dulu tinggal di tempat itu sejak tahun 1975. Warga Timor Timur yang mengungsi pada tahun 1975 disebabkan oleh perang saudara, setelah wilayah tersebut ditinggalkan oleh penjajah Portugal.

2 <https://nasional.kompas.com/read/2008/04/25>

Setelah menempati rumah-rumah di areal program pemukiman kembali (*resettlement*), bukan berarti masalah yang dihadapi oleh warga baru dianggap selesai. Program pemukiman kembali bersifat *top down*, sebagai instruksi dari atas atau dari pemerintah, dan kurang melihat kebutuhan pengungsi yang sesungguhnya. Program pemukiman baru sering dianggap sebagai tahap terakhir dalam membantu pengungsi, padahal kebutuhan sosial ekonomi pengungsi pasca bermukim menjadi persoalan yang juga membutuhkan perhatian. Oleh karena itu pemukiman kembali dapat dianggap sebagai program yang bersifat “menunda masalah”, karena tidak ada tahapan program jangka panjang pasca pemukiman kembali. Studi ini memaparkan problem sosial yang dihadapi warga baru eks pengungsi Timor Timur di Belu, Nusa Tenggara Timur, dan problem interaksi sosial antara pengungsi dengan penduduk lokal. Sebagian besar data dari ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan pada kehidupan pengungsi yang ada di Sukabitetek, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Identitas Pengungsi Timor Timur

Sesuai dengan tema penguatan identitas dan segregasi sosial, maka berikut dipaparkan konseptualisasi tentang dua problem studi tersebut. Dalam pengertian umum, identitas sosial mengacu pada definisi diri seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Individu akan menghayati kediriannya dari sudut pandang kelompok sosial secara keseluruhan.³ Adapun dalam wacana sosiologis dan antropologis, identitas diberi pengertian sebagai ‘menjadi sama dengan diri sendiri dan menjadi berbeda dengan yang lain’.⁴ Identitas sosial lahir ketika seseorang harus mendefinisikan dirinya berdasarkan atribut yang membedakan dirinya dengan orang lain dalam kelompoknya. Identitas sosial adalah atribut bersama, yaitu cara pandang kelompok lain terhadap kelompok tersebut berdasarkan persamaan-persamaan atribut para individu dalam kelompok itu. Konsep identitas sosial berkaitan dengan proses sosial, termasuk ketika individu dihadapkan pada konteks sosial budaya yang berbeda dalam proses interaksi dengan lingkungan yang baru. Konsep identitas sosial berangkat dari kebutuhan akan pemahaman terhadap proses sosial tentang prasangka, deskriminasi, konflik antar kelompok dan perubahan sosial.

3 Mead Brown, Rupert. *Social Identity* dalam Kuper, Adam dan Kuper, Jessica. (edt). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.986-987.

4 Thomas Hylland Eriksen . *Ethnicity and Nationalism Anthropology Perspectives*, (London: Pluto Press, 1993), hlm.59-60.

Dengan pengertian tersebut, maka dalam mengkaji identitas eks pengungsi Timor Timur dalam studi ini, dilakukan dengan melihat hubungan sosial mereka dengan kelompok lain, dalam hal ini penduduk lokal di Belu, Nusa Tenggara Timur. Konsep identitas sebagaimana dikemukakan di atas dapat dipakai untuk memahami pola interaksi antara penduduk lokal dengan warga baru eks pengungsi Timor Timur. Cara pandang penduduk lokal terhadap warga baru, demikian sebaliknya cara pandang warga baru terhadap penduduk lokal terus mengalami dinamika. Pada tahap awal pengungsi berbaur dengan penduduk lokal, sisi kemanusiaan dan persamaan kultur menjadi cara pandang yang positif dari penduduk lokal terhadap pengungsi, dan begitu pula sebaliknya. Identitas keduanya menjadi lebur karena perasaan sebagai saudara dan kultur yang sama.

Setelah hampir duapuluh tahun eks pengungsi Timor Timur menempati kamp-kamp pengungsi di lahan pemerintah dan lahan penduduk, cara pandang warga lokal terhadap warga baru dan sebaliknya mengalami dinamika. Berbagai kesulitan hidup, terutama sulitnya akses ekonomi, kondisi pemukiman yang kurang memadai, serta terpisahnya pemukiman eks pengungsi Timor Timur dengan pemukiman warga lokal menyebabkan terjadi penguatan identitas masing-masing. Penguatan identitas semakin terjadi manakala pemerintah mengganti sebutan eks pengungsi Timor Timur yang menetap di Indonesia sebagai "warga baru". Sebutan itu juga semakin menguatkan *stereotype* yang diberikan penduduk lokal terhadap warga baru, yaitu sebagai orang yang temperamental, menumpang, dan malas. Sementara muncul pula prasangka dari warga baru terhadap warga lokal, terutama kepada aparat pemerintah yang dianggap deskriminatif. Munculnya prasangka negatif, baik dari penduduk lokal terhadap warga baru maupun sebaliknya, menyebabkan terjadinya konflik antara warga baru dengan warga lokal.

Secara kultural, sesungguhnya harmoni antara eks pengungsi Timor Timur dengan warga lokal dapat terjalin dengan baik, karena antara Timor Timur dengan Timor Barat memiliki akar kultural yang sama.⁵ Warga baru eks pengungsi Timor Timur acapkali menyatakan bahwa ketika mereka menyeberang ke Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), mereka menganggap bukan sebagai orang baru, tetapi sedang mencari "tali pusar", karena Timor Timur dan Timor Barat (Nusa Tenggara Timur) adalah satu. Hanya saja kebijakan yang

5 Neonbasu, Gregor. *Citra Manusia Berbudaya Sebuah Monografi tentang Timor dalam Perspektif Melanesia*. (Jakarta; Penerbit Antara Publishing), hlm. 351.

diambil pemerintah terhadap pengungsi, dalam pelaksanaannya yang bersifat teknis administratif dan *top down* telah menghasilkan penguatan identitas warga lokal dan warga baru eks pengungsi Timor Timur.

Penguatan identitas itu terjadi karena eks pengungsi Timor Timur ditempatkan dalam pemukiman yang terpisah dengan pemukiman warga lokal, meskipun ada dalam satu wilayah dusun atau satu desa. Pemukiman eks pengungsi Timor Timur umumnya mirip *enclave* atau wilayah sub-bagian yang terpisah atau terkurung, dan berbeda dengan wilayah umumnya. Pemukiman eks pengungsi yang secara fisik berbeda dengan pemukiman warga lokal, menyebabkan komunitas eks pengungsi Timor Timur tidak bisa membaaur seutuhnya dalam interaksi sehari-hari dengan warga lokal. Pemukiman eks pengungsi Timor Timur ini juga cenderung mirip pemukiman komunitas *subaltern*, terpisah dan terkunci serta mendapat perlakuan yang berbeda dengan komunitas umumnya dalam wilayah itu.

Program pemukiman kembali (*resettlement*) yang dilaksanakan pemerintah itu memunculkan segregasi sosial. Menurut Bayer (2001: 2) segregasi umumnya di cirikan oleh pemisahan kelompok dalam pemukiman yang ekstrim, kesenjangan tingkat kemiskinan, dan isolasi yang menghasilkan proses interaksi yang pincang. Segregasi dapat berdampak positif maupun negatif.⁶ Segregasi dalam tahapan tertentu bisa menjadi sarana transformasi dalam interaksi antar etnis, agar imigran baru dapat secara bertahap mengenal budaya lokal dan beradaptasi secara perlahan. Namun, jika pemisahan terjadi secara ekstrim sebagaimana yang terjadi dalam program *resettlement* eks pengungsi Timor Timur, maka hal itu justru dapat menguatkan identitas yang mengarah kepada eksklusifitas masing-masing kelompok dalam proses sosial.

Segregasi sosial dan penguatan identitas yang terjadi dapat dijelaskan dengan asumsi teori deprivasi sosial Robert Ted Guur (1970).⁷ Interaksi yang pincang pada aras komunitas disebabkan oleh adanya perasaan frustrasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat, yang disebut sebagai *relative deprivation* (perampasan relatif). Frustrasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat, yang disebut sebagai *relative deprivation* dapat dipahami sebagai pandangan aktor

6 Bayer, Patrick. *The Cases and Consequences of Residential Segregation; An Equilibrium Analysis of Neighborhood Sorting*. (California; Public Policy Institut of California, 2001), hlm. 2.

7 Gurr, Robert Ted. *Why Men Rebel*. (Princeton: Princenton University Press, 1970).

tentang kesenjangan antara ekspektasi atau nilai harapan dengan nilai kapabilitas, atau kesenjangan negatif antara harapan (legitimate) dengan aktualitas. Ekspektasi adalah kondisi kehidupan, barang, atau hal-hal lain yang diyakini dimiliki oleh orang lain, dan dirinya punya hak yang sama dengan apa yang dimiliki orang lain tersebut.⁸

Adapun Ekspektasi dapat didefinisikan sebagai manifestasi sekumpulan norma yang diunggulkan oleh lingkungan sosial dan kultural sebuah komunitas. Dalam harapan ada anggapan bahwa apa yang diinginkan bisa dimiliki. Sumber dari rasa “dapat memiliki”, mungkin karena pendahulunya telah memilikinya. Dalam konteks interaksi antara eks pengungsi Timor Timur dengan penduduk lokal, terjadi ketika orang pribumi merasa tersisih dari pendatang eks pengungsi Timor Timur. Atau ketika pendatang eks pengungsi Timor timur merasa memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang lebih baik di Indonesia setelah mereka berjuang membela integrasi Timor-Timur. Pada ranah inilah terjadi penguatan identitas masing-masing pihak; eks pengungsi Timor-Timur maupun penduduk lokal.

Dalam program *resettlement* eks pengungsi Timor Timur, seolah pemerintah menganggap bahwa warga baru harus dipisahkan dalam kelompok dan aktivitas sosial yang berbeda, karena identitas sosial mereka yang berbeda. Sebutan tentang identitas yang berbeda, yaitu sebagai “warga baru” untuk mengganti istilah “pengungsi Timor Timur” menjadikan relasi “tali pusar” yang memiliki ciri kultur yang sama dengan warga lokal, mereduksi persamaan kultural antara dua komunitas tersebut. Warga baru menjadi komunitas yang secara kultural memiliki identitas berbeda dengan warga lokal. Penguatan identitas warga baru di hadapan warga lokal dan sebaliknya menghasilkan *stereotype*, prasangka, dan kecemburuan sosial, sehingga potensial menjadi konflik antar kedua komunitas itu.

Sadar atau tidak, pemerintah dengan program *resettlement* menghasilkan pelaksanaan yang cenderung mirip strategi kebudayaan dominan. Menurut Eriksen terdapat tiga model pendekatan pada negara modern dalam membangun nasionalisme atau persatuan dari ragam etnik yang hidup di suatu negara. Pertama adalah kebijakan asimilasi, kedua adalah kebijakan kebudayaan dominan, dan yang ketiga adalah multikulturalisme.⁹

Sebutan warga baru dan pola pemukiman yang terpisah

8 Gurr, *Why Men Rebel*, hlm. 3-5

9 Eriksen, Thomas Hyland. 1993. *Ethnicity and Nationalism Anthropological Approach*. (London-Boulder, Colorado: Pluto Press), hlm.123-124

menunjukkan strategi dominasi negara yang mencerminkan dominasi mayoritas atas minoritas. Meskipun bukan sebagai bagian dari kebijakan negara, namun penanganan eks pengungsi Timor Timur selama ini secara tidak disengaja telah menghasilkan segregasi sosial, disebabkan oleh proses sosial akibat dari perbedaan kelas mengikuti garis etnik, dikotomi etnik, dan stigma minoritas.

Sejarah dan Dinamika Eks Pengungsi Timor Timur Di Timor Barat

Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Timur merupakan wilayah yang paling mudah dijangkau oleh pengungsi yang ingin keluar dari Timor Timur, pasca peristiwa jajak pendapat di tahun 1999. Di samping itu, kesamaan etnik dan budaya di antara sebagian penduduk pribumi Timor Timur dengan penduduk Belu menjadi alasan utama daerah tersebut sebagai tujuan utama dari pengungsi. Kesamaan etnik dan budaya itu membuat mudah para pengungsi dalam berinteraksi dengan penduduk di Kabupaten Belu.

Para pengungsi yang masuk melalui wilayah perbatasan Motaain di Kabupaten Belu merupakan kelompok pengungsi yang berasal dari sektor barat. Mereka menempuh jalur darat menggunakan kendaraan, dan menetap di Kabupaten Belu dan Malaka, dua wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor-Timur. Menurut Olyvianus Dadi Lado (2016) sebagaimana dikutip oleh Dedimus Dedi Dhosa (2017), eksodus warga Timor Timur pro integrasi yang ingin masuk ke Indonesia berasal dari tiga sektor, yaitu timur, tengah, dan barat. Pengungsi yang berasal dari sektor timur dan tengah, dievakuasi melalui jalur laut dan udara dan berlabuh di pelabuhan Kupang dan Bandara Eltari Kupang.¹⁰ Sebagian dari para pengungsi kemudian menetap di Sukabitek, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk.

Kehadiran pengungsi di wilayah Belu terjadi dalam tiga konteks peristiwa yang berlangsung di Timor Timur, yaitu di tahun 1912, 1975, dan tahun 1999. Pengungsian ke wilayah perbatasan Indonesia di tahun 1912 terjadi karena perang akibat kolonialisme Portugis, pengungsian di tahun 1975 disebabkan oleh perang saudara yang terjadi akibat kemerdekaan yang dilakukan secara sepihak oleh Partai FRETILIN. Adapun pengungsian pada tahun 1999 terjadi setelah jajak pendapat, yang menghasilkan kemenangan rakyat pro kemerdekaan atas rakyat pro integrasi Indonesia.

¹⁰ Dhosa, Dedimus Dedi. *Ekonomi Politik dan Pembangunan Eks Pengungsi Timor Timur*. Artikel lepas pos-kupang.com (edisi 3 Desember 2016).

Setelah pemerintah kolonial Belanda tumbang, maka Timor Barat menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan nasib Timor Timur setelah ditinggalkan oleh Pemerintah Portugal masih harus berjuang untuk merdeka. Bahkan perang saudara terus berkecamuk sejak tahun 1974 hingga tahun 1999. Setelah pemerintah Indonesia berusaha turut membangun Timor Timur sejak berintegrasi di tahun 1975 sampai tahun 1999, namun atas desakan internasional, Indonesia di bawah pengawasan PBB akhirnya harus memberi kebebasan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui jajak pendapat.

Gejolak politik yang membawa Indonesia masuk ke pusaran konflik di Timor Timur, terjadi setelah peristiwa Revolusi Bunga atau disebut pula revolusi Anyelir, pada tanggal 24 April 1974. Revolusi bunga adalah peristiwa yang menandai kudeta yang dilakukan oleh Jendral Espinola. Paska kepemimpinan yang baru, dimulai proses dekolonialisasi terhadap negeri-negeri jajahan Portugis. Pemimpin baru itu memulai dengan janji-janji memberikan kebebasan kepada rakyat di wilayah jajahan Portugal membentuk partai-partai politik. Tujuannya adalah mengembangkan demokrasi di wilayah jajahan, dalam rangka mempersiapkan kebijakan pemerintah kelak setelah mampu menentukan nasib sendiri.¹¹

Akan halnya di Timor Portuguese, kebijakan pemerintah baru Portugal tersebut membawa perubahan politik yang baru di Timor Timur. Namun bukanlah perdamaian dan kemerdekaan yang segera di dapat, melainkan konflik yang berkepanjangan. Beberapa partai mulai berdiri dan berkembang dengan haluan ideologi masing-masing.

Pertama adalah ASDT (*Associação Social Democrata Timorese* = Perhimpunan Sosial Demokrat Timor), yang kemudian berubah nama menjadi FRETILIN (*Frente Revolucionario de Timor Leste Independente*= Front Revolusi bagi Kemerdekaan Timor Leste) yang berhaluan komunis. Perubahan nama partai itu disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan ideologi dari para tokoh pendiri ASDT. Ideologi FRETILIN mengadopsi FRELIMO sebuah partai berhaluan komunis yang berdiri di Mozambique, yaitu koloni Portugal di Afrika Timur. Prinsip yang dibangun oleh Fretilin adalah kemerdekaan penuh Timor Timur tanpa bergantung kepada satu negarapun.

Kemudian UDT (*União Democrática Timorese* = Persatuan

11 Soares, Jose Remigio Pinto. *Perjuangan kemerdekaan Rakyat Timor loro Sa'e; Kumpulan Tulisan East Timor Student Movement*. (Yogyakarta: East Timor Student Movement, 1997), hlm.34.

Demokrat Timor-Timur) berdiri. Berbeda dengan FRETILIN yang menginginkan kemerdekaan penuh, UDT menginginkan kemerdekaan bertahap melalui otonomi progresif di bawah Portugal. Partai lainnya yang kemudian APODETI (Associação Popular Democrática de Timor = Perhimpunan Rakyat Demokrat Timor). Prinsip politik APODETI adalah mewujudkan kemerdekaan bagi rakyat Timor Portuguese melalui integrasi dengan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Timor Portuguese. Bagi para pendiri dan pengikut APODETI, berintegrasi dengan Indonesia adalah jalan terbaik menuju kesejahteraan, karena di samping keinginan untuk lepas dari bayang-bayang Portugis, berintegrasi dengan Indonesia menjadi jalan terbaik untuk menyatukan kembali masyarakat di Pulau Timor yang telah terbelah dua karena kolonialisme.

Dua partai lain yang lebih kecil juga berdiri adalah KOTA dan Tralabalista. Partai KOTA (Klibur OAN Timor Assuain) yang menginginkan pemerintahan kembali ke kerajaan dengan dipimpin oleh para *liurai* (raja). Adapun Partai Tralabalista didukung oleh imigran keturunan Arab dan Tionghoa, juga menginginkan agar Timor Timur tidak merdeka sendiri.

Suasana politik di Timor Timur menjadi hingar bingar, karena berdirinya partai-partai tanpa penengah yang memiliki otoritas yang kuat untuk menjadi perantara.¹² Dari sisi kekuatan, FRETILIN menjadi partai terkuat karena didukung oleh milisi Timor Portugis. Ketika APODETI berdiri, dua partai di Timor-Timur, yaitu FRETILIN dan UDT menguasai pemerintahan dan angkatan bersenjata warisan Portugal. Keduanya berkoalisi dengan maksud dapat menghancurkan APODETI dan menguasai pemerintahan.¹³ Namun tidak lama berkoalisi, terjadi konflik antara keduanya.

Kondisi yang terus memanas di Timor-Timur setelah pemerintah kolonial Portugal meninggalkan wilayah itu, membuat pemerintah Portugal merasa perlu hadir lagi mempertemukan partai-partai yang saling bertikai. Namun pertemuan yang diprakarsai oleh pemerintah Portugal selalu gagal menghasilkan kesepakatan, terutama karena ketidakhadiran salah satu partai yang diundang, yaitu FRETILIN.

Kondisi di Timor-Timur semakin keruh, ketika terjadi proklamasi kemerdekaan oleh Partai UDT pada pertengahan 1975. Proklamasi itu sontak membuat FRETILIN marah dan terjadi pertempuran hebat. FRETILIN yang unggul persenjataannya, menang dalam pertempuran

12 Neonbasu, *Citra Manusia*, hlm.359.

13 Soares, *Perjuangan Kemerdekaan*, hlm.36.

ini. Meskipun UDT sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya keteteran. Pertempuran sengit kedua kubu pecah pada tanggal 14 September 1975 di Batugede, hingga UDT mundur sampai ke wilayah perbatasan Indonesia di Motaain. Mereka bergabung dengan pengungsi lainnya yang sudah datang sebelumnya di wilayah perbatasan Motaain.¹⁴

FRETILIN secara sepihak kemudian juga memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975. Setelah menyatakan merdeka, pada tanggal 2 Desember 1975, presiden FRETILIN Francisco Xavier do Amaral mengumumkan susunan Pemerintahan Republik Demokrasi Timor Timur. Proklamasi sepihak oleh FRETILIN menyebabkan kondisi politik yang tidak menentu semakin berlarut-larut, hingga terjadi pengungsian ke wilayah Indonesia, terutama dari pengikut dan simpatisan partai APODETI yang pro Integrasi dengan Indonesia. Dalam kekuasaan FRETILIN pada tahun 1974-1976, pemerintah Timor Portugese terus melakukan pembersihan terhadap rakyat yang Pro Integrasi yang dipelopori oleh partai APODETI¹⁵ Banyak terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh pengikut FRETILIN terhadap pengikut APODETI dan rakyat pro integrasi Indonesia. Pada saat itu pula terjadi pengungsian rakyat Timor Timur ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Soeharto merasa terpanggil untuk membebaskan rakyat Timor Timur terutama dari tindakan pembersihan yang dilakukan oleh FRETILIN. FRETILIN yang memiliki haluan ideologi komunis dianggap dapat menjadi ancaman baru di kawasan perbatasan Indonesia dan Australia, karena kekuasaan FRETILIN yang terus berkembang dan menguat di Timor Timur. Upaya pembebasan rakyat Timor Timur dari kekuasaan FRETILIN dikenal dengan nama operasi Seroja. Selain mendapat dukungan dari para pengikut partai-partai pro integrasi, TNI juga didukung oleh ribuan pengungsi yang ingin kembali ke Timor-Timur.

Operasi pembebasan Timor-Timur menemukan momentum yang baik, karena situasi perang dingin antara Amerika dengan Uni Sovyet pada masa itu. Persaingan dalam peta geopolitik dunia pada masa itu, menyebabkan pandangan Amerika Serikat yang mengangggap campur tangan untuk menangani kericuhan di Timor Timur karena kekuasaan Fretilin yang dianggap berhaluan komunis perlu dilakukan. Jika Indonesia dapat menguasai Timor-timur,

14 Syahnakri, Kiki. *Timor Timur The Untold Story.*(Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm.45-49.

15 Soares, *Perjuangan Kemerdekaan*, hlm. 41.

maka perkembangan komunisme di wilayah Asia Tenggara dapat dihentikan. Persetujuan Amerika tentang invasi Indonesia ke Timor Timur terungkap dalam dokumen lembaga independen National Security Archive.¹⁶

Timor Timur akhirnya resmi menjadi bagian dari NKRI dan menjadi provinsi yang ke 27. Pengesahan Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia tertuang dalam UU No.76 tahun 1976 tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soeharto sebagai presiden RI pada masa itu menyebut integrasi Timor Timur ke Indonesia sebagai “kembalinya anak yang hilang”.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan Timor Timur ke Indonesia tidak membuat gejolak berakhir. Setelah Timor-Timur menjadi bagian dari Indonesia, pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia di Timor Timur. Tidak terbatas pada pembangunan fisik, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan. Banyak generasi muda Timor Timur diberi beasiswa untuk kuliah di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Namun gangguan keamanan dan profokasi terus dilakukan oleh pengikut FRETILIN dengan bergerilya dari hutan ke hutan.

Pasca perang dingin, runtuhnya Uni Sovyet dan kemenangan Amerika Serikat, menyebabkan FRETILIN semakin terdesak secara ideologis. Namun demikian perjuangan kemerdekaan Timor Timur dengan cara memisahkan diri dari Indonesia, terus dipropagandakan oleh FRETILIN. Mereka mulai melakukan pendekatan kepada Amerika dan sekutu terdekatnya di Asia Tenggara, yaitu Australia.

Momentum untuk segera merdeka bagi Timor Timur terjadi setelah peristiwa penembakan demonstran di pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991, dan Jatuhnya Soeharto di bulan Mei 1998. Peristiwa Santa Cruz yang memakan puluhan korban dari pihak demonstran, membangkitkan simpati dunia internasional. Perjuangan pemimpin FRETILIN di luar negeri mulai mendapat simpati, dan agenda HAM Internasional mengarah ke Indonesia. PBB mengecam Indonesia dan membentuk badan penyelidikan independen untuk mengusut peristiwa tersebut.¹⁷

Puncak dari momentum merdeka bagi Timor Leste adalah

16 <https://nasional.tempo.co/read/70068/amerika-setuju-indonesia-invasi-timor-timur>

17 <https://tirto.id/tragedi-santa-cruz-dan-sejarah-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-b4FM>.

lengsernya Soeharto akibat gerakan reformasi yang dipimpin Amien Rais. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Bacharudin Jusuf Habibie yang menggantikan Soeharto dalam masa transisi, terus mendapat tekanan internasional. Menurut Pinto dalam reformasi Indonesia, referendum bagi rakyat Timor Leste merupakan salah satu topik penting. Amien Rais setelah bertemu dengan Xanana Gusmao di Rumah Tahanan Salemba, mengatakan bahwa “reformasi Timor Leste adalah bagian dari agenda reformasi”.¹⁸

Pada tanggal 19 Desember 1998 Australia mengirim surat kepada Presiden Habibie tentang perubahan sikap Australia, yang semula mendukung integrasi Timor Timur di Indonesia, dan kemudian membela perjuangan Timor Timur untuk berpisah dari Indonesia. Perubahan sikap Australia disinyalir karena memiliki kepentingan atas celah timor yang kaya akan minyak bumi.

Persetujuan Indonesia untuk menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur disambut baik oleh PBB dan pemerintah Portugal yang pernah menjajah dan meninggalkan Timor Timur dalam kondisi perang saudara. Pada tanggal 5 Mei 1999 dilakukan perundingan tripartit antara Indonesia, PBB, dan Portugal di New York. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pelaksanaan jajak pendapat yang akan diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1999.

Di bawah pengawasan United Nations Mission in East Timor (UNAMET) jajak pendapat dilaksanakan. Jajak pendapat diikuti oleh 451.792 orang pemilih. Hasil jajak pendapat diumumkan pada tanggal 4 September di Dili dan di markas PBB di Geneva. Hasil jajak pendapat menunjukkan dari suara total yang memilih sejumlah 438.998 suara, sebanyak 344.580 atau 78,5% menginginkan Timor Timur merdeka dan menolak integrasi dengan otonomi khusus. Sisanya hanya sekitar 21,5 % atau sejumlah 94.388 orang menginginkan berintegrasi dengan Indonesia dengan otonomi khusus.

Persebaran dan Program untuk Pengungsi

Ketakutan dan ancaman yang terjadi pasca jajak pendapat, menyebabkan tidak hanya mereka yang memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia lantas berbondong-bondong mengungsi, namun banyak warga yang bukan pro integrasi turut menyeberang ke wilayah Indonesia yang terdekat dengan wilayah perbatasan, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pesebaran pengungsi di NTT dapat dirunut

¹⁸ Pinto, Julio Thomas. *Keamanan Nasional Negara Kecil: Sistem Terpadu di Timor Leste*. (Yogyakarta: Penerbit Saujana 2015), hlm. 2

dari akses perbatasan yang ada di provinsi tersebut. Para pengungsi terutama yang keluar dari Timor Timur pasca jajak pendapat 1999 menyebar ke wilayah-wilayah terdekat di perbatasan darat.

Menurut DW Tadeus, secara administratif perbatasan darat di Timor bagian barat dengan Timor Leste meliputi sepuluh kecamatan yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Alor.¹⁹ Sepuluh kecamatan itu meliputi kecamatan yang menjadi bagian Kabupaten Kupang, yaitu Kecamatan Amfoang Utara. Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur, dan Kecamatan Insana Utara. Kecamatan di Kabupaten Belu antara lain: Kecamatan Malaka Timur (termasuk Kecamatan Raimanuk yang kemudian menjadi wilayah kecamatan sendiri), Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lamaknen, Rehaat, Kobalima.

Akses di wilayah laut terdapat perbatasan di 4 (empat) kabupaten dengan lima kecamatan, yaitu kabupaten Kupang meliputi Kecamatan Amfoang utara, Kabupaten Belu meliputi Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Kobalima. Kabupaten Timor Tengah Utara perbatasan laut ada di Kecamatan Insana Utara. Adapun akses laut di Kabupaten Alor terletak di Kecamatan Alor Barat Daya.

Jumlah pengungsi secara keseluruhan sejak terjadi eksodus pasca jajak pendapat di tahun 1999 dan pasang surutnya sampai kini sulit dipastikan. Selain karena sistem pendataan yang kurang memadai, para pengungsi juga telah dianggap sebagai bukan lagi pengungsi. Di samping itu, peningkatan jumlah jiwa dan keluarga mereka akibat pernikahan dan semakin banyaknya keturunan juga menyebabkan jumlah mereka semakin sulit dipastikan.

Hingga kini pesebaran beserta jumlah eks pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu juga sulit didapatkan, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang menagani pengungsi. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh data bahwa hampir di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Belu terdapat kamp pemukiman kembali (*resettlement*). Pesebaran pemukiman eks pengungsi Timor-timur dapat dilihat sebagaimana dalam gambar sketsa peta pesebaran eks pengungsi Timor Timur.

¹⁹ <https://www.antaranews.com/berita/383947/data-perbatasan-darat-indonesia-timor-leste>

Sketsa Pesebaran Eks Pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu



Pengungsian dalam jumlah besar tentu tidak hanya membawa masalah bagi diri para pengungsi, tetapi juga membawa problem bagi daerah tujuan pengungsi di Indonesia. Para pengungsi umumnya menghadapi masalah dengan bekal mereka untuk menjalani hidup di tempat pengungsian, dan masa depan mereka selanjutnya. Demikian pula pemerintah menghadapi masalah, karena banyaknya pengungsi yang datang dapat memicu problem sosial. Untuk itu setelah pengungsi Timor Timur tinggal di Indonesia, pemerintah menawarkan kepada mereka tiga bentuk opsi program, yaitu transmigrasi, repatriasi, dan *resettlement*. Penanganan pengungsi timor timur, secara nasional ditetapkan melalui kebijakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Abdurrahman wahid No.3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi.

Problem Sosial Eks Pengungsi Timor Timur: Studi Kasus di Sukabitek

Terdapat empat persoalan utama yang dihadapi oleh pengungsi, yaitu ketiadaan akses terhadap pelayanan dasar, perumahan, akses

tanah, dan lapangan pekerjaan.²⁰ Adapun dalam studi ini ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh warga baru eks pengungsi Timor Timur, setelah mereka mendapat program pemukiman kembali dari pemerintah. Masalah yang dihadapi mereka antara lain adalah; akses terhadap tanah atau kepemilikan tanah yang dapat menjamin tempat hidup mereka setelah bermukim, sumber penghidupan, konflik sosial dengan masyarakat lokal, dan komodifikasi atas problem eks pengungsi Timor Timur oleh politisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Masalah yang dihadapi oleh eks pengungsi Timor Timur di Belu umumnya adalah masalah adaptasi dengan daerah tempat mereka mengungsi, dan dalam berinteraksi dengan penduduk lokal. Perbedaan kehidupan di daerah asal dengan daerah pengungsi menyebabkan mereka harus mengatur kembali cara hidup, termasuk menyangkut nilai-nilai budaya. Pada tahap ini secara sosio-antropologis eks pengungsi Timor-Timur dihadapkan pada pergulatan identitas budaya. Persentuhan dengan cara hidup baru, umumnya diawali dengan kejutan budaya (*cultural shock*). Kejutan budaya terjadi manakala seseorang belum terbiasa atau tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan sosial dari nilai-nilai budaya yang baru.²¹ Dalam kondisi seperti ini maka seseorang bisa mengalami disorientasi dan depresi.

Sebagai studi kasus, berikut diberikan gambaran tentang problem sosial pada komunitas eks pengungsi Timor Timur di Sukabitetek, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komunitas eks pengungsi di Sukabitetek Desa Leuntolu berada di wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Jumlah eks pengungsi Timor Timur di Desa itu relatif banyak, lebih dari seratus kepala keluarga, tersebar di tiga dusun, yaitu Di Dusun Weibutak, Dusun Kota Sukaer, dan Dusun Kuanitas. Di Dusun Weibutak terdapat 78 kepala keluarga eks pengungsi Timor Timur, di Dusun Kota Sukaer terdapat 42 kepala keluarga eks pengungsi Timor Timur, dan di Dusun Kuanitas terdapat 12 kepala keluarga eks pengungsi Timor Timur.

20 Kuswardono, T. *Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi*. (Policy Paper No.1/1/2014), 3. *Institute for Research and Empowerment (IRE)*. Lihat juga Alkatiri, Farid Abud. *Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi di Kabupaten Belu*. dalam *Jurnal Kawistira*, (Vol 8. No 1. April, 2018), hlm.22-32.

21 Karim. *Kawin Campur dan Dinamika Kehidupan di Antara Dua Identitas*, dalam Pande Made Kutaneegara & Judith Schelhe (edt) *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006), hlm.79.

Setelah hampir duapuluh tahun, kini eks pengungsi Timor Timur yang masih tinggal di Sukabitetek, dan juga di tempat lain di Kabupaten Belu disebut sebagai warga "baru". Mereka telah tercatat dalam administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah setempat sebagai Warga Negara Indonesia, dan mendapat Nomor Induk kependudukan (NIK) sehingga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK dan KTP yang dimiliki tentu membawa implikasi paada segala hak serta kewajiban yang melekat sebagai rakyat Indonesia, sama seperti warga lokal yang telah menjadi warga Indonesia sejak lahir.

1. Masalah Tanah

Warga baru eks pengungsi Timor Timur di Sukabitetek pada saat ini masih bisa hidup tenang, namun mereka juga sering mengutarakan kecemasan tentang kehidupan mereka dan keluarganya di masa yang akan datang. Rasa cemas itu muncul karena mereka hidup di atas lahan bukan hak milik pribadi, melainkan hidup di atas tanah milik pemerintah, dan sebagian lagi hidup di atas lahan yang dipinjamkan oleh penduduk lokal.

Karena menempati rumah di atas lahan bukan milik sendiri, maka selalu ada kekhawatiran bahwa pada suatu saat mereka harus ke luar dari lahan tersebut. Boleh jadi di suatu hari nanti, pemerintah akan mengambil tanah itu kembali, sehingga mereka harus mencari tempat tinggal. Kekhawatiran terhadap keharusan meninggalkan pemukiman di atas lahan pemerintah dan warga lokal selalu membayangi warga baru. Hal itu disebabkan karena kondisi ekonomi mereka yang tidak memungkinkan untuk membeli lahan sendiri.

Dalam studi yang dilakukan oleh Alkatiri disebutkan bahwa kesulitan eks pengungsi Timor Timur dalam mengakses lahan untuk tempat tinggal dan sumber penghidupan menyebabkan persoalan yang semakin kompleks di kemudian hari.²² Warga baru mengalami eksklusi sosial yang menyebabkan akses mereka terhadap tanah dan berbagai sumber penghidupan menjadi terbatas. Akses mereka terhadap lahan untuk pemukiman dan bertani sangat terbatas, karena penguasaan tanah terutama dominasi suku lokal dan tiadanya usaha pemerintah yang lebih komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut.

Ekklusi sosial juga menyebabkan warga baru kesulitan mengakses program perumahan RISHA (Rumah Sehat Instan dan

22 Alkatiri, *Akses Tanah*, hlm.22-32

Sederhana) yang ditawarkan pemerintah.²³ Pemerintah pusat pada tahun 2016 meluncurkan program tersebut berupa 285 unit rumah di Desa Silawan, Desa Dualaos, dan Desa Fatuketi. Perumahan tersebut diberikan untuk penduduk lokal maupun eks pengungsi Timor Timur. Meskipun hampir semua eks pengungsi Timor Timur belum memiliki rumah yang layak, namun mereka kesulitan dalam mengakses program pemerintah tersebut. Akhirnya program perumahan untuk rakyat umumnya lebih mudah diakses oleh penduduk lokal yang memiliki lahan dan akses terhadap kekuasaan pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Elit pemerintah desa dan daerah cenderung bersifat deskriminatif dalam menyalurkan bantuan program perumahan murah dari pemerintah.²⁴

Di Sukabitetek dan beberapa pemukiman warga baru di kota Atambua, akses terhadap program perumahan RISHA dan perumahan rakyat lainnya belum ada. Menurut seorang keluarga pengungsi di Haliwen Atambua, mereka sudah pernah mengirim surat kepada presiden, ketika Jokowi datang dan meninjau ke wilayah perbatasan Kabupaten Belu mereka melakukan penghadangan dan menyampaikan surat tersebut. Salah seorang koordinator eks pengungsi menyatakan demikian. "Kami warga eks pengungsi Timor Timur tanpa rumah dan garapan untuk hidup. Kami berharap bapak Presiden dan Ibu negara bisa membantu kehidupan kami".²⁵ Menurut Mariano Parada, meskipun pemerintah memberikan bantuan perumahan di wilayah perbatasan, ternyata bantuan perumahan lebih banyak di akses oleh penduduk lokal, bukan warga baru eks pengungsi Timor Timur yang lebih membutuhkan.²⁶

2. Sumber Ekonomi dan Pendidikan

Selain karena akses terhadap kepemilikan lahan dan perumahan yang layak, sumber penghidupan ekonomi juga menjadi masalah bagi warga baru setelah mereka tinggal di lokasi *resettlement*. Program *resettlement* bagi warga baru tidak diikuti dengan program pasca bermukim, seperti pemberdayaan ekonomi dan akses terhadap sumber ekonomi. Di Sukabitetek, warga baru umumnya mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan

23 <https://nusantaranews.co/285-risha-di-ntt-siap-dihuni-warga-eks-pengungsi-timor-timur/>.

24 Alkatiri, *Akses Tanah*, hlm.30-32

25 <https://news.okezone.com/read/2016/12/29/337/1578124/sepucuk-surat-eks-warga-timor-timur-untuk-presiden-jokowi>

26 Wawancara dengan Mariano Parada di pemukiman warga baru Haliwen, Atambua. 18 Desember 2018.

mengolah lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar pemukiman milik pemerintah.

Di Haliwen warga baru selain mengolah lahan pertanian, sebagian dari mereka juga menyambung hidupnya dari pekerjaan menjual kayu bakar. Kayu bakar mereka ambil dari hutan yang berada di wilayah perbatasan Motaain. Karena jarak yang relatif jauh untuk ditempuh, setiap pagi mereka pergi ke hutan dan kembali membawa kayu bakar di sore harinya. Sementara itu warga baru dari kalangan generasi muda di Haliwen bekerja sebagai tukang ojek. Pemukiman yang dekat dengan Bandar Udara A.A. Bere Talo Atambua, menyebabkan usaha ojek cukup menguntungkan. Adapun sebagian warga baru di wilayah perbatasan Tasifeto Timur banyak menggantungkan hidupnya dari menjual garam.

Sebagian besar pekerjaan eks pengungsi Timor Timur, adalah jenis pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan tingkat pendidikan tertentu. Pekerjaan yang layak bagi warga eks Timor Timur sulit didapatkan, karena faktor kemampuan yang terbatas, dan belum ada upaya dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Umumnya warga baru tidak memiliki ketrampilan yang memadai sehingga sulit mendapat pekerjaan di luar sektor pertanian, buruh, dan pekerjaan sejenis yang dianggap kurang menguntungkan. Sebagian generasi muda keluarga warga baru memilih untuk merantau di Malaysia dan beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan sebagai buruh di perusahaan perkebunan, atau buruh perusahaan industri, dan pembantu rumah tangga .

Kesulitan untuk mendapat pekerjaan yang layak juga disebabkan tiadanya modal usaha. Modal untuk memulai pekerjaan sulit didapatkan, karena untuk mencukupi kebutuhan pokok keseharian saja masih terbatas. Warga baru pernah mendapat bantuan beberapa kali dari pemerintah maupun lembaga internasional UNHCR, dan umumnya bantuan yang mereka dapat berupa paket bantuan untuk hidup sementara selama mengungsi. Bantuan itu mereka dapatkan antara tahun 1999 sampai tahun 2001. Di luar bantuan biaya hidup, seperti untuk modal usaha, ketrampilan bekerja, dan pemberdayaan ekonomi memang tidak pernah diberikan kepada warga baru.

Bantuan modal ekonomi yang bersifat umum, termasuk untuk warga umumnya dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pernah didapatkan oleh eks pengungsi Timor Timur melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah. Program Anggur Merah dilaksanakan pada masa kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya,

mulai tahun 2011. Di antara bantuan yang mereka dapatkan adalah mesin traktor untuk kelompok tani, dan satu ekor sapi masing-masing untuk 2 (dua) kepala keluarga, dan juga beras untuk warga miskin (raskin). Menurut warga baru, bantuan tersebut sangat membantu dan mereka berharap ada bantuan khusus untuk pemberdayaan ekonomi.

Ketidakmampuan untuk mendapat akses pekerjaan yang layak bagi eks pengungsi Timor Timor juga disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah. Anak-anak dari warga baru umumnya hanya mengenyam pendidikan sampai usia sekolah menengah. Sebagain anak-anak usia sekolah yang seharusnya mendapat pendidikan yang layak terpaksa harus putus sekolah, karena faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya. Meskipun pemerintah memberi sekolah gratis sampai tingkat sekolah menengah atas, namun alasan uang saku dan transportasi menjadi alasan warga baru tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat atas.

Sementara itu sebagian warga usia dewasa dan usia tua tidak pernah mengenyam sekolah, dan buta huruf. Ketidakmampuan untuk membaca dan menulis menyebabkan mereka sulit mengakses pekerjaan-pekerjaan diluar pertanian dan buruh kasar. Bahkan sebagian warga juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Mereka hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa lokal Tetun atau bahasa etnis mereka sendiri.

Ketidakmampuan untuk membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia juga menyebabkan sulitnya sebagian warga baru untuk berinteraksi dengan penduduk lokal dan aparat pemerintah. Perbedaan kultur dan bahasa juga menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pengalihan lahan, dan akses terhadap pekerjaan atau sumber ekonomi. Namun demikian dalam konteks warga baru di Desa Leuntolu, meskipun banyak warga baru yang buta huruf dan tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, mereka masih diuntungkan karena adanya kesamaan kultur dan bahasa dengan masyarakat Belu. Bahkan, di antara kedua kelompok warga tersebut, masih memiliki satu rumah adat jauh sebelum kolonialisme memporak-porandakan ikatan komunalisme di Timor. Kondisi tentang kesamaan kultur sebgaiian besar warga baru di Belu dengan penduduk lokal, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun harmoni kedua kelompok tersebut, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

3. Komodifikasi Politik dan Ekonomi

Dalam konsep marginalisasi dan praktik kuasa, pelabelan masyarakat marginal, miskin, dan juga pengungsi cenderung dilanggengkan untuk kepentingan elit tertentu yang dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai proyek. Menurut Dedimus Dedi Dhosa, kks pengungsi Timor Timur cenderung dijadikan proyek oleh pemerintah dan elite swasta agar mereka memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik.²⁷ Tidak hanya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di luar provinsi tersebut eks pengungsi Timor Timur juga sering dijadikan sebagai komoditi politik. Dalam pemilihan legislatif dan pilkada, sebagian elit politik menjadikan eks pengungsi Timor Timur sebagai lumbung suara dalam pemilihan calon legislatif dan calon presiden menjelang pemilu berlangsung.

Hal tersebut juga terjadi di ketiga lokasi pemukiman warga baru di Sukabitetek. Menjelang pesta demokrasi dan saat masa seperti kampanye, para calon kepala daerah dan legislatif berkunjung ke kamp kamp pengungsi, karena secara tidak langsung warga pengungsi memiliki jumlah suara yang banyak tidak kalah dengan jumlah penduduk asli yang menetap di daerah tersebut. Warga eks Timor Timur sering dijanjikan berbagai macam janji yang menggiurkan, namun pada kenyataannya setelah mereka terpilih semua janji itu lenyap tak pernah terwujud. Mereka hanya korban politik yang dimanfaatkan hak suaranya saja dan selalu diberikan janji tanpa adanya realisasi. Menjadikan eks pengungsi Timor Timur sebagai komoditas politik dan ekonomi, tidak hanya dilakukan oleh warga lain di luar eks pengungsi, aparat pemerintah dan LSM, justru komodifikasi eks pengungsi juga dilakukan oleh elit pengungsi sendiri.

4. Konflik dengan Warga Lokal

Sikap penduduk lokal terhadap pengungsi pada dasarnya sangat baik dan merespon secara positif. Hal itu bisa dilihat pada awal kedatangan para pengungsi. Penduduk lokal secara sukarela menyambut, membantu saudara mereka dari Timor Timur. Sebagai bagian dari sikap kemanusiaan dan solidaritas, sebagian penduduk bahkan rela menyediakan lahan mereka untuk dijadikan tempat mengungsi dan untuk bertani. Sampai saat ini, setelah eks pengungsi Timor Timur hidup hampir duapuluh tahun di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, banyak eks pengungsi Timor Timur yang justru menjadi elit desa, tokoh politik yang justru ada di wilayah-

²⁷ <http://kupang.tribunnews.com/2016/12/03/ekonomi-politik-dan-pembangunan-eks-pengungsi-timor-timur>

wilayah dengan mayoritas penduduk lokal. Pernikahan antara warga eks pengungsi Timor Leste dengan warga lokal juga biasa terjadi. Itu artinya bahwa penduduk lokal sangat terbuka dan menerima warga baru dengan baik.

Namun demikian tidak dapat pula dipungkiri bahwa perselisihan atau konflik yang melibatkan penduduk lokal dengan warga baru sering terjadi. Setelah hampir duapuluh tahun eks pengungsi Timor Timur hidup bersama dan berinteraksi dengan penduduk lokal, terjadi penguatan identitas, dan masing-masing memberikan *stereotype* terhadap lawan interaksi. Potensi konflik itu misalnya dapat dilihat pada pelabelan sosial terhadap eks pengungsi Timor Timur yang dipandang sebagai sosok yang temperamental, malas, dan mau menangnya sendiri.

Disamping terjadi penguatan identitas masing-masing kelompok, beberapa program kebijakan pemerintah yang dilaksanakan juga menjadi penyebab kecemburuan di antara mereka. Dalam beberapa kasus terjadi sikap saling cemburu antar mereka. Ketika pemerintah memberikan bantuan program kepada eks pengungsi Timor Timur, penduduk lokal merasa bahwa mereka terlalu dimanjakan. Demikian halnya dalam pelaksanaan beberapa program pemerintah pusat maupun daerah untuk semua warga, eks pengungsi Timor Timur merasa didiskriminasi.

Sebuah kasus konflik yang menyebabkan perkelahian misalnya pernah terjadi di Belu. Bentrok biasanya terjadi hanya di kalangan pemuda, di acara-acara pesta, seperti pernikahan, upacara adat, atau festival ditempat-tempat ramai di mana mereka saling bertemu. Pada bulan November 2018 misalnya, terjadi bentrok antar pemuda yang tergabung dalam aliran silat tertentu yang berbeda antara kedua kelompok tersebut.

Di wilayah Belu berkembang dua aliran silat, yaitu PSHT dan Kera sakti. Superioritas yang dikembangkan dalam tindakan masing-masing anggota aliran tersebut, menyebabkan mereka sering berselisih karena saling bersaing. Peristiwa bentrok terjadi di pertigaan Lurasik, wilayah perbatasan antara Desa Leuntolu dengan Desa Lurasik. Peristiwa itu mengakibatkan satu orang korban, warga lokal tertikam pisau di keningnya, dan satu orang pemuda eks pengungsi mengalami pendarahan dan luka serius di kepalanya, karena dikeroyok oleh pemuda lokal di Lurasik.

Jika dikaji lebih lanjut, perselisihan yang terjadi acapkali bukan

disebabkan oleh persoalan antara kedua komunitas, yaitu antara warga baru eks pengungsi dengan penduduk lokal, melainkan akibat masalah pribadi maupun hal lainnya. Namun masalah tersebut acapkali ditarik ke dalam kelompok atau kedua komunitas tersebut. Sebagai contoh, misalnya persoalan persaingan antara organisasi pencak silat, juga menyebabkan perselisihan antara orang Timor Leste dengan eks Pengungsi timor Timur. Pada bulan November terjadi pembunuhan di sekitar Pasar Atambua, karena perkelahian antara orang Timor Leste dengan eks Pengungsi yang berada di NTT. Warga Timor Leste yang masuk secara illegal, dan kemudian mati terbunuh di sekitar pasar Atambua tersebut tanpa membawa identitas yang lengkap. Pembunuhan terjadi disebabkan karena sensitifnya salah seorang yang menyaksikan orang tersebut memakai baju kebanggaan organisasi silat tertentu. Naas, ia mati terbunuh dengan mayat yang masih ditahan di perbatasan Motaain Indonesia dengan Timor Leste. Tertahannya korban disebabkan akibat korban yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, dan tanpa membawa identitas.

Perselisihan antara penduduk lokal dengan warga baru biasanya juga terjadi akibat permasalahan lahan. Sebagian eks pengungsi selain bermukim di atas lahan pemerintah, sebagian yang lain juga bermukim di atas lahan pinjaman atas kebaikan penduduk lokal. Masalah biasanya terjadi di kemudian hari, ketika tanah tersebut akan diambil kembali oleh keluarga atau anak-anak dari pemilik lahan tersebut.

Salah seorang warga baru di Haliwen juga menceritakan tentang perselisihan yang disebabkan oleh persoalan lahan. Di Haliwen perselisihan yang disebabkan rebutan lahan biasa terjadi antara warga baru dan warga lama. Di Haliwen warga lama bukan menunjuk pada warga lokal, tetapi warga yang datang mengungsi dari Timor Timur pada tahun 1975 dan tahun 1912. Ketika warga baru mencoba mengolah lahan yang dianggap belum tergarap, acapkali terjadi perselisihan dengan warga lama yang menganggap lahan tersebut sebagai miliknya.

Penutup

Dari uraian di atas telah ditunjukkan, bahwa permasalahan eks pengungsi Timor Timur belum selesai meski proses rehabilitasi sosial ekonomi itu telah berjalan hampir duapuluh tahun. Namun demikian para pengungsi masih menunjukkan kesetiaan dan rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Kesetiaan itu tidak pernah surut, meskipun mereka masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan

di Indonesia. Eks pengungsi yang berusaha ke luar dari kemiskinan, bekerja serabutan untuk sekedar bertahan hidup. Banyak di antara mereka yang sudah kembali ke Timor Leste, namun masih banyak juga yang tetap memilih tinggal di Timor Barat. Kecintaan terhadap Indonesia menjadi alasan mereka tetap bertahan, meskipun harus mempertahankan hidup dengan menjadi buruh bangunan, penjual garam, buruh tani, dan sebagainya.

Dalam beberapa pertemuan dan diskusi dengan warga baru eks pengungsi Timor Timur di Sukabitetek maupun di pemukiman warga baru lainnya di Belu Nusa Tenggara Timur, umumnya mereka menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi saat ini. Mereka katakan "kami mencintai tanah air Indonesia, tetapi kami hanya memiliki air saja, tidak ada tanah". Kalimat itu merupakan *satire* bahwa eks pengungsi Timor Timur telah berjuang demi mencintai Indonesia, tetapi negara kurang peduli terhadap kesejahteraan mereka. Kenyataan menunjukkan, setelah hampir duapuluh tahun eks pengungsi Timor Timur berada di Indonesia, sebagai akibat kekalahan dalam referendum kemerdekaan Timor Timur, mayoritas dari mereka masih menempati lahan pemerintah atau lahan milik penduduk lokal dengan kondisi fisik pemukiman yang memprihatinkan.

Itu artinya secara pragmatis dapat dipandang bahwa nilai kebangsaan warga baru tersebut seolah memudar, dan kenyataannya tidak seperti itu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa nasionalisme warga baru tetap tinggi, namun godaan pragmatis dalam membangun hidup baru yang lebih baik ketika bergabung dengan Indonesia, membuat mereka merasakan kekecewaan terhadap negara. Apa yang dijalani dalam kehidupan pada masa lalu ketika hidup di Timor Timur, kemudian dibandingkan dengan kondisi yang dialami saat ini, yaitu ketika mereka mau mengambil resiko meninggalkan Timor Timur demi mencintai Indonesia. Apa yang diingat di masa lalu tentang Timor Timur adalah "kebaikan" Indonesia membangun Timor Timur, dan "membalut luka" akibat perang saudara dan penjajahan Portugis yang berkepanjangan. Lalu apa yang mereka lupakan tentang kehidupan di Timor Timur adalah kerabat yang mereka tinggalkan, juga tanah, rumah, dan ternak yang menjadi sumber penghidupan.

Namun kenyataan yang dialami, setelah mereka mengambil resiko dengan melupakan semua yang dimiliki di tanah kelahiran, semua sumber penghidupan itu belum juga diperoleh gantinya ketika di Indonesia, negeri yang mereka cintai dan dibela sampai mati. Wajar dan manusiawi jika kemudian warga baru banyak menuntut

hal-hal yang bersifat pragmatis, menyangkut sumber penghidupan dasar manusia, berupa rumah tempat tinggal, tanah, dan sumber penghidupan ekonomi. Realitas itu bisa dikaitkan dengan asumsi yang dikemukakan Gelner, bahwa sentimen nasionalisme adalah perasaan marah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip, atau perasaan kepuasan yang ditimbulkan oleh pemenuhannya. Tuntutan tentang sumber penghidupan yang layak yang harus diberikan negara atas warganya, dapat dilihat sebagai bagian dari bentuk nasionalisme berupa “kemarahan yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip” bahwa negara harus menjamin kesejahteraan warganya.²⁸

Secara kultural membangun nasionalisme eks pengungsi Timor Timur adalah keniscayaan, karena antara Timor Timur dengan Timor Barat memiliki akar kultural yang sama.²⁹ Warga baru eks pengungsi Timor Timur acapkali berkata bahwa ketika mereka menyeberang ke Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), mereka menganggap bukan sebagai orang baru, tetapi sedang mencari “tali pusar”, karena Timor Timur dan Timor Barat adalah satu. Nasionalisme eks pengungsi Timor Timur secara kultural juga didukung oleh ethos keagamaan, dimana gereja Katholik telah memperkuat relasi antara Timor Timur dan Timor Barat. Hanya saja kebijakan yang diambil pemerintah terhadap pengungsi, dalam pelaksanaannya yang bersifat teknis administratif dan *top down* telah menghasilkan penguatan identitas warga lokal dan warga baru eks pengungsi Timor Timur.

Penguatan identitas itu terjadi karena eks pengungsi Timor Timur ditempatkan dalam pemukiman yang terpisah dengan pemukiman warga lokal, meskipun ada dalam satu wilayah dusun atau satu desa. Pemukiman eks pengungsi Timor Timur umumnya mirip *enklave* atau wilayah sub-bagian yang terpisah atau terkurung, dan berbeda dengan wilayah umumnya. Pemukiman eks pengungsi yang secara fisik berbeda dengan pemukiman warga lokal, menyebabkan komunitas eks pengungsi Timor Timur tidak bisa membaaur seutuhnya dalam interaksi sehari-hari dengan warga lokal. Pemukiman eks pengungsi Timor Timur ini juga cenderung mirip pemukiman komunitas *subaltern*, terpisah dan terkunci serta mendapat perlakuan yang berbeda dengan komunitas umumnya dalam wilayah itu.

Program pemukiman kembali (*resettlement*) yang dilaksanakan pemerintah itu memunculkan segregasi sosial. Seolah pemerintah menganggap bahwa warga baru harus dipisahkan dalam kelompok

28 Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*, 1993, hlm.99.

29 Neonbasu, *Citra Manusia*, 2017, hlm. 4.

dan aktivitas sosial yang berbeda, karena status yang berbeda pula. Sebutan yang berbeda, yaitu sebagai “warga baru” untuk mengganti istilah “pengungsi Timor Timur” menjadikan relasi “tali pusu” yang memiliki ciri kultur yang sama dengan warga lokal, mereduksi persamaan kultural antara dua komunitas tersebut. Warga baru menjadi komunitas yang secara kultural berbeda dengan warga lokal. Penguatan identitas warga baru di hadapan warga lokal dan sebaliknya, menghasilkan *stereotype*, prasangka, dan kecemburuan sosial, sehingga potensial menjadi konflik antar kedua komunitas itu.

Sadar atau tidak, pemerintah dengan program *resettlement* menghasilkan pelaksanaan yang cenderung mirip strategi kebudayaan dominan.³⁰ Sebutan warga baru dan pola pemukiman yang terpisah menunjukkan strategi dominasi negara yang mencerminkan dominasi mayoritas atas minoritas. Meskipun bukan sebagai bagian dari kebijakan negara, namun penanganan eks pengungsi Timor Timur selama ini secara tidak disengaja telah menghasilkan segregasi sosial, disebabkan oleh proses sosial akibat dari perbedaan kelas mengikuti garis etnik, dikotomi etnik, dan stigma minoritas.

Daftar Bacaan

- Alkatiri, Farid Abud. 2018. *Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi di Kabupaten Belu*. dalam *Jurnal Kawistra*, Vol 8. No 1. April, hal 22-32.
- Andriana, Nina. 2016. *Nasionalisme dan Keindonesiaan di Perbatasan*. Yogyakarta: Calpunis dan LIPI.
- Bau, Yanuarius Koli., Therik, Wilson M.A., Dewi Subhani Kusuma. 2008. *Analisis Sosial Budaya di Timor Barat*. Nusa Tenggara Timur; Amrican Friends Service Committe in Indonesia.
- Brown, Rupert. (2000). *Social Identity* dalam Kuper, Adam dan Kuper, Jessica. (edt). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bayer, Patrick. (2001). *The Cases and Consequences of Residential Segregation; An Equilibrium Analysis of Neighborhood Sorting*. Public Policy Institut of California.
- BPS. (2018). *Raimanuk dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Belu.
- CHEGA. (2010). *Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste- Volume II*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- CHEGA. (2005). *Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi*

³⁰ Eriksen, *Etnicity and Nationalism*, 1993, hlm.123.

- (CAVR) di Timor Leste- Volume I. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Dhosa, Didimus Dedi. (2016). *Ekonomi Politik dan Pembangunan Eks Pengungsi Timor Timur*. Artikellepas pos-kupang.com edisi 3 Desember.
- Eriksen, Thomas Hyland. (1993). *Etnicity and Nationalism Anthropological Approach*. London-Boulder, Colorado: Pluto Press
- Guru, Valerius P (edt.). (2017). *Desa Sejahtera, Negara Kuat (Aspek-aspek Penting Pembangunan Pedesaan di Provinsi NTT)*. Singaraja: Undiksha Press.
- Guur, Ted Robert. (1970). *Why Men Rebel*. Pricenton, NJ: Pricenton University Press.
- Hirst, Mega. (2008). *Meraih Persahabatan Melepas Kebenaran; laporanb Pemantauan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste*. Jakarta, Penerbit International Center for Transitional Justice (ICTJ).
- Karim. (2006). *Kawin Campur dan Dinamika Kehidupan di Antara Dua Identitas*, dalam Pande Made Kutanegara & Judith Schelhe (edt) *Budaya Barat dalam Kacamata Timur* . Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Kymlicka, Will. (2002). *Kewargaan Multikultur*. Jakarta: LP3ES.
- Kustriyati. (2010). *Penanganan Pengungsi di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*. Jakarta: Brillian Internasional.
- Missbach, Antje. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*. Diedit oleh Aditya Pratama. Diterjemahkan oleh Windu Wahyudi Yusuf. Yogyakarta: Ombak.
- Messakh, Thobias A. (2003). *Kebijakan Pemukiman Kembali Pengungsi di Perbatasan Indonesia - Timor Leste (Studi Kasus: Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mulia, Yogi. (2013). *Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000-2012)*. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol.1., No.2. Universitas Riau.
- Neonbasu, Gregor. (2017). *Citra Manusia Berbudaya Sebuah Monografi tentang Timor dalam Perspektif Melanesia*. Penerbit Antara Publishing.
- Pemerintah Transisi PBB di Timor Timur. (2000). *Laporan Kemajuan Timor Timur*. Tt.
- Pinto, Julio Thomas. (2015). *Keamanan Nasional Negara Kecil: Sistem Terpadu di Timor Leste*. Yogyakarta: Penerbit Saujana.

- Puspitasari, Yuni. (2013). *Upaya Indonesia dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan dengan Timor Leste Pada Periode 2002-2012*. Skripsi Fisipol UIN Jakarta.
- Sasangka, Gatot. (1993). *Evaluasi Pelaksanaan Repelita V Propinsi Dati I Timor Timur; Sektor Transmigrasi*. Tt?
- Soares, Jose Remigio Pinto. (1997). *Perjuangan kemerdekaan Rakyat Timor loro Sa'e; Kumpulan Tulisan East Timor Student Movement*. Yogyakarta: East Timor Student Movement.
- Syahnakri, Kiki. (2013). *Timor Timur The Untold Story*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
- Riberio, Afonso Rosario Guterres. (2014). *Upaya Pemerintah Xanana Gusmao dalam Memulangkan Pengungsi Eks Timor di NTT Tahun 2009-2013*. Thesis UPN Veteran Yogyakarta.
- Wiharyanto, A. Kardiyat. (2011). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Wuryandari, Ganewati. (2009). *Keamanan di Perbatasan Timor Leste; Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.